

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018



Jl.Aria Surialaga (D/H Cibalagung No.1. Bogor 16001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dra. Rosari Hadi Armadiana, .M.Pd
NIP. 19631218 198803 2 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Aset Lain-lain

C.3.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

- D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
- D.2. Beban Pegawai
- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1. Koreksi Lain-lain
 - E.4.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.3. Penyesuaian Nilai Aset
 - E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.5. Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.6. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dra.Rosari Hadi Armadiana,.M.Pd
NIP. 19631218 198803 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp209.271.162,00 atau mencapai 110,61% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp189.200.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp42.619.630.112,00 atau mencapai 98,12% dari alokasi anggaran sebesar Rp43.434.047.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp453.043.056.631,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp45.277.500,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp452.789.791.631,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp207.987.500,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp180.561.517,00 dan Rp452.862.495.114,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp85.120.383,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp45.603.844.242,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-45.518.723.859,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp218.392.064,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-45.300.331.795,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp449.568.679.086,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-45.300.331.795,00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp11.790.668,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp48.582.357.155,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp452.862.495.114,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	189.200.000,00	209.271.162,00	110,61	315.033.341,00
Jumlah Pendapatan		189.200.000,00	209.271.162,00	110,61	315.033.341,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	10.975.762.000,00	10.564.699.069,00	96,25	10.413.462.505,00
Belanja Barang	B.4.	25.862.546.000,00	25.483.057.643,00	98,53	34.507.469.066,00
Belanja Modal	B.5.	6.595.739.000,00	6.571.873.400,00	99,64	4.001.549.021,00
Jumlah Belanja		43.434.047.000,00	42.619.630.112,00	98,12	48.922.480.592,00

II. NERACA

SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) BOGOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	44.229.000,00	0,00
Persediaan	C.1.2.	1.048.500,00	259.000,00
Jumlah Aset Lancar		45.277.500,00	259.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	387.968.335.000,00	387.968.335.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	30.085.356.597,00	20.683.556.842,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	56.990.729.818,00	54.537.836.168,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	5.832.408.000,00	5.057.908.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	581.794.225,00	581.794.225,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	307.820.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.7.	-18.419.979.726,00	-15.342.430.604,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7.	-7.870.389.403,00	-3.168.363.164,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.7.	-2.157.882.030,00	-766.241.582,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	C.2.7.	-220.580.850,00	-158.406.344,00
Jumlah Aset Tetap		452.789.791.631,00	449.701.808.541,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	267.700.000,00	30.000.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	26.928.600,00	26.928.600,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3.	-26.928.600,00	-26.928.600,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-59.712.500,00	-22.500.000,00
Jumlah Aset Lainnya		207.987.500,00	7.500.000,00
Jumlah Aset		453.043.056.631,00	449.709.567.541,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	58.814.600,00	50.413.455,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2.	77.517.917,00	90.475.000,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.3.	44.229.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		180.561.517,00	140.888.455,00
Jumlah Kewajiban		180.561.517,00	140.888.455,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	452.862.495.114,00	449.568.679.086,00
Jumlah Ekuitas		452.862.495.114,00	449.568.679.086,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		453.043.056.631,00	449.709.567.541,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) BOGOR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	85.120.383,00	104.900.345,00
JUMLAH PENDAPATAN		85.120.383,00	104.900.345,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	10.564.699.069,00	10.413.462.505,00
Beban Persediaan	D.3.	1.742.874.002,00	1.126.615.845,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	15.396.015.208,00	19.500.135.508,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	922.234.500,00	1.076.530.500,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	7.695.627.980,00	13.104.426.513,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	9.282.393.483,00	5.527.514.115,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0,00	-270.325,00
JUMLAH BEBAN		45.603.844.242,00	50.748.414.661,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-45.518.723.859,00	-50.643.514.316,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	38.400.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	265.596.699,00	361.817.086,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	8.804.635,00	4.302.500,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		218.392.064,00	357.514.586,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-45.300.331.795,00	-50.285.999.730,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) BOGOR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1.	449.568.679.086,00	214.956.984.059,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-45.300.331.795,00	-50.285.999.730,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Lain-lain	E.4.1.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2.	11.790.668,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.3.	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4.	0,00	236.286.986.819,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	48.582.357.155,00	48.610.707.938,00
EKUITAS AKHIR		452.862.495.114,00	449.568.679.086,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor

STPP Bogor merupakan salah satu dari enam lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan. STPP merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian di Kementerian Pertanian. Ke enam lembaga memiliki konsentrasi pendidikan di bidang penyuluhan yakni Penyuluhan Pertanian dan Penyuluhan Peternakan.

Organisasi dan Tata Kerja STPP Bogor berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 dan Statuta STPP Bogor berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014. Struktur Organisasi STPP Bogor terdiri atas: (1) Senat, (2) Ketua, (3) Wakil Ketua, (4) Unsur Penjaminan Mutu, (5) Unsur Pelaksana dan Penunjang Akademik, (6) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, (7) Bagian Administrasi Umum, dan (8) Kelompok Jabatan Fungsional. Senat didalamnya diisi oleh sekumpulan orang terdiri atas Ketua STPP Bogor merangkap sebagai anggota, sekretaris merangkap anggota, anggota senat yang meliputi: Wakil Ketua, Ketua Program Studi, perwakilan dosen dan unsur lain.

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Aria Surialaga No 1 d/h Cibalagung No 1 - Bogor

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas*, dan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Visi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita sebagai STPP yang handal dan berwawasan global dalam mencetak penyuluh pertanian profesional, STPP Bogor telah merumuskan visi, yaitu:

***“Terwujudnya Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Terdepan
Dalam Menghasilkan Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayati Pertanian
(RIHP)
yang Handal dan Profesional”***

Misi

Mengacu pada Visi maka untuk mencapainya dirumuskan Misi sebagai berikut :

- (1) **Mengembangkan kelembagaan STPP Bogor**, yaitu mengembangkan kelembagaan STPP Bogor yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003);
- (2) **Meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi**, yaitu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada sistem jaminan mutu dengan berorientasi pada aspek relevansi kebutuhan SDM di sektor pertanian dan dinamika perubahan lingkungan strategis;
- (3) **Meningkatkan profesionalisme Dosen dan Tenaga Kependidikan**, yaitu Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangannya, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
- (4) **Mengembangkan kerjasama dan jejaring agribisnis dengan pemangku kepentingan baik nasional, regional maupun internasional**, yaitu pengembangan kerjasama dengan semua pihak yang relevan dengan upaya pembangunan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan pelaksanaan program pendidikan dan penelitian, serta memperluas pengabdian kepada masyarakat dan jaringan kemitraan untuk kepentingan STPP Bogor, serta berupaya membangun jejaring agribisnis dengan pelaku usaha bidang pertanian sebagai langkah nyata membangun sinergi antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha.

Tujuan

Tujuan strategis yang hendak dicapai STPP Bogor sesuai dengan visi dan misi 2016-2019 adalah:

- (1) **Mewujudkan pengembangan program Tridharma Perguruan Tinggi.** Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan urat nadi sebuah lembaga pendidikan tinggi. Oleh karenanya, STPP Bogor dalam mewujudkannya ditujukan untuk menjawab permasalahan yang ada di lapangan, solutif inovatif, partisipatif dan berbasis budaya lokal. **(T1)**
- (2) **Meningkatkan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.** Peningkatan mutu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

selalu menjadi acuan di dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa, masyarakat dan institusi pengguna lulusan STPP Bogor. **(T2)**

- (3) **Menjadikan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional.** Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan perlu dibangun sejak awal untuk menciptakan iklim pembelajaran yang baik dan mutu lulusan yang handal dan kompetitif. Untuk menjawab tuntutan tersebut, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan menjadi prioritas yang terus dikembangkan. Dengan meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, maka jaminan untuk menghasilkan mutu lulusan yang handal dan kompetitif dapat terwujud. **(T3)**
- (4) **Menyiapkan sarana prasarana sesuai standar dalam menunjang kelembagaan.** Dukungan sarana prasarana yang memadai serta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi suatu keharusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Upaya ini secara bertahap telah dilakukan oleh STPP Bogor dalam rangka menciptakan suasana akademik yang representatif. Standarisasi sarana prasarana yang ada masih terus berlanjut berikut alokasi anggarannya dan menjadi tujuan dalam setiap tahun anggaran. **(T4)**
- (5) **Mewujudkan dan meningkatkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan.** Kerjasama dengan pemangku kepentingan merupakan wujud pengakuan keberadaan STPP Bogor. Mahasiswa yang telah lulus kembali ke daerah asalnya dan bekerja pada instansinya tentunya menjadi bagian pengikat antara STPP Bogor dengan instansi dimana alumni berada. Pemangku kepentingan yang lain pun menjadi mitra STPP Bogor. Selain bertugas mencetak lulusan yang handal dan kompetitif, STPP Bogor juga sebagai bagian dari Kementerian Pertanian yang dalam operasionalnya tidak lepas dari upaya mensosialisasikan dan menginformasikan program-program Kementerian Pertanian sehingga jejaring kerja dengan pemangku kepentingan di daerah adalah juga menjadi tujuan STPP Bogor. **(T5)**

Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan strategis yang diharapkan (T1-T5), sasaran strategis pelaksanaan kegiatannya di tahun 2016-2019 adalah :

- (T1) 1. Terselenggaranya pendidikan vokasi Diploma Penyuluhan Pertanian berjenjang dengan jumlah mahasiswa memadai; **(S1)**
2. Tercapainya ISO bidang penyelenggaraan pendidikan, Akreditasi institusi dan program studi; **(S2)**
3. Terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dapat menjawab permasalahan yang dihadapi secara solutif, inovatif dengan pendekatan budaya lokal; **(S3)**
4. Terselenggaranya kegiatan penelitian setiap tahun satu dosen minimal satu judul penelitian dengan tema atau topik kekinian serta menjawab kebutuhan lapangan. **(S4)**
- (T2) 5. Terselenggaranya pendidikan bidang RIHP selain Penyuluhan Pertanian dengan jumlah mahasiswa memadai; **(S5)**

6. Tercapainya mutu lulusan yang handal dan kompetitif melalui kurikulum pendidikan vokasi berbasis IPTEK-IT; **(S6)**
7. Meningkatnya pelayanan kepada mahasiswa melalui kegiatan akademik yang menunjang tinggi budaya kampus yang kondusif dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung spesialisasi keahlian penunjang bagi mahasiswa; **(S7)**
8. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung program pemberdayaan petani baik secara mandiri, institutif maupun pengawalan program Kementerian Pertanian; **(S8)**
9. Meningkatkan pelayanan kepada institusi/lembaga/dinas pengirim mahasiswa tugas belajar melalui informasi kemajuan belajar secara berkala setiap semester. **(S9)**
- (T3)** 10. Terspesialisasinya keahlian tenaga pendidik berdasarkan bidang keilmuan melalui pelatihan atau pendidikan formal yang berbasis *linearityknowledge or background study*; baik melalui tugas belajar maupun pelatihan/kursus fungsional bersertifikat. **(S10)**
11. Tersertifikasinya profesionalisme tenaga pendidik melalui sertifikasi dosen dan teregistrasinya NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) seluruh tenaga pendidik. **(S11)**
12. Tersedianya tenaga kependidikan profesional berdasarkan kebutuhan instalasi/laboratorium pendidikan melalui pengembangan fungsionalisasi jabatan tenaga kependidikan. **(S12)**
13. Terfasilitasinya operasionalisasi lembaga penjaminan mutu pendidikan dan lembaga pelayanan masyarakat tani melalui penguatan dan formasi kelengkapan lembaga penjaminan mutu pendidikan. **(S13)**
- (T4)** 14. Terfasilitasinya peningkatan optimalisasi sarana dan prasarana utama dan penunjang kegiatan pendidikan sesuai dengan SNP. **(S14)**
15. Terbangunnya sistem pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan perencanaan pada setiap tahun anggaran. **(S15)**
16. Terstandarisasinya sarana prasarana pendidikan, terutama laboratorium pendidikan melalui standar akreditasi KAN. **(S16)**
- (T5)** 17. Terjalinannya kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan kelembagaan STPP Bogor. **(S17)**
18. Terciptanya suatu kerjasama pembinaan kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok wanita tani yang kontinyu dan bertanggung jawab dalam rangka penyebaran informasi, inovasi dan pendampingan penguatan kelembagaan. **(S18)**
19. Terbangunnya inisiasi kelembagaan-kelembagaan petani/pelaku usaha yang baru dalam rangka memberikan pemahaman urgensi terbentuknya kelembagaan sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang berorientasi agribisnis. **(S19)**
20. Pengembangan kerjasama dengan kelembagaan petani/pelaku usaha di luar wilayah Kota/Kabupaten Bogor untuk memperkuat dan meningkatkan peran STPP Bogor sebagai lembaga pendidikan bidang penyuluhan pertanian dan sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan program-program pembangunan pertanian. **(S20)**

21. Terselenggaranya kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi pemerintah di dalam negeri dan luar negeri dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **(S21)**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	189.200.000,00	189.200.000,00
Jumlah Pendapatan	189.200.000,00	189.200.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.760.962.000,00	10.531.762.000,00
Belanja Lembur	214.800.000,00	444.000.000,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0,00	0,00
Belanja Barang Operasional	9.342.705.000,00	8.681.086.000,00
Belanja Barang Non Operasional	6.586.971.000,00	5.571.976.000,00
Belanja Barang Persediaan	1.834.900.000,00	1.579.805.000,00
Belanja Jasa	1.324.170.000,00	1.228.035.000,00
Belanja Pemeliharaan	912.482.000,00	922.472.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.653.435.000,00	7.879.172.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.065.610.000,00	3.623.656.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.692.790.000,00	2.195.597.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	776.486.000,00
Jumlah Belanja	43.388.825.000,00	43.434.047.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp209.271.162,00 atau mencapai 110,61% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp189.200.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	93.802.000,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	189.200.000,00	72.163.300,00	38,14
Pendapatan Lain-lain	0,00	43.305.862,00	0,00
Jumlah	189.200.000,00	209.271.162,00	110,61

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami penurunan sebesar -33,57% dibandingkan TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	93.802.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	72.163.300,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa	0,00	25.100.000,00	- 100,00
Pendapatan Lain-lain	43.305.862,00	139.285.741,00	-68,91
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	150.647.600,00	- 100,00
Jumlah	209.271.162,00	315.033.341,00	-33,57

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp42.619.630.112,00 atau 98,12% dari anggaran belanja sebesar Rp43.434.047.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	10.975.762.000,00	10.564.699.142,00	96,25
Belanja Barang	25.862.546.000,00	25.520.405.202,00	98,68
Belanja Modal	6.595.739.000,00	6.571.873.400,00	99,64
Total Belanja Kotor	43.434.047.000,00	42.656.977.744,00	98,21
Pengembalian Belanja		-37.347.632,00	0.00
Total Belanja	43.434.047.000,00	42.619.630.112,00	98,12

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar -12,88% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai :

Semester II TA 2017 sebanyak 149 pegawai, semester II TA 2018 sebanyak 143 pegawai, hal ini mempengaruhi tunjangan yang ada.

2. Belanja Barang :

Pagu anggaran TA 2018 menurun dibandingkan pagu anggaran TA 2017 sebesar -27,74 %,

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	10.564.699.069,00	10.413.462.505,00	1,45
Belanja Barang	25.483.057.643,00	34.507.469.066,00	- 26,15
Belanja Modal	6.571.873.400,00	4.001.549.021,00	64,23
Total Belanja	42.619.630.112,00	48.922.480.592,00	- 12,88

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.564.699.069,00 dan Rp10.413.462.505,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,45% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Semester II TA 2017 sebanyak 149 pegawai, semester II TA 2018 sebanyak 143 pegawai, hal ini mempengaruhi tunjangan yang ada.

Bulan	Jumlah Pegawai	Keterangan	
Januari	149		
Pebruari	149		
Maret	151	Masuk a.n	1. Yohanes Bayu Suharto, MS.i 2. drh.Aulia Miftakhur
April	151		
Mei	151		
Juni	150	Pensiun a.n	Ir.Edy Kusmiadi
Juli	150		
Agustus	150		
September	147	Pensiun a.n	1. Dr.Susilo Wibowo 2. Jaya 3. Ir.Epi Sopiadi, M,Sc
Oktober	146	Meninggal a.n	Sukriyanto
Nopember	145	Pensiun a.n	Fudloli.A.Kurnia,A.Md
Desember	143	Pensiun a.n Meninggal a.n	1. Ahmad Junaidi 1. Dr.Sugeng Widodo,M.Ed

2. Adanya 19 orang pegawai yang belum turun SK kenaikan pangkatnya , terhitung 1 april 2018

No	Nama Pegawai	No SK	Tanggal SK	Tentang	Tanggal Mulai Berlaku
1	2	3	4	5	6
1	Dr.Dayat,SP.,M.Si	607/Kpts/KP.210/A2.4/04/2017	17 April 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
2	Siti Syamsiah,SP.,M.Si	746/Kpts/KP.210/A2.4/04/2018	29 Maret 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
3	Opik Ahmad Taopik,S.Pd.,M.Pd	608/Kpts/KP.210/A2.4/04/2018	17 April 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
4	Doni Maryanto,SE	606/Kpts/KP.210/A2.4/04/2018	17 April 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
5	Arif Prastiyanto,SP	610/Kpts/KP.210/A2.4/04/2018	17 April 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
6	Sri Hardanti,S.Si	740/Kpts/KP.210/A2.4/04/2018	17 April 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
7	Titus Pury Purboningtyas,SP	607/Kpts/KP.210/A2.4/04/2018	17 April 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
8	Kadiq,SE	609/Kpts/KP.210/A2.4/04/2018	17 April 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
9	Efri Junaidi,M.Si	750/Kpts/KP.210/A2.4/04/2018	17 April 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
10	Fita Dwi Untari, S.I.kom	036/Kpts/KP.210/I.1/03/2018	26 Maret 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
11	Sukriyanto	080/Kpts/KP.210/I.1/03/2018	26 Maret 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
12	Abas Basri	077/Kpts/KP.210/I.1/03/2018	26 Maret 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
13	Engkos Koswara	076/Kpts/KP.210/I.1/03/2018	26 Maret 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
14	Udung	074/Kpts/KP.210/I.1/03/2018	26 Maret 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
15	Wartono	079/Kpts/KP.210/I.1/03/2018	26 Maret 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
16	Wawan Anwarudin	075/Kpts/KP.210/I.1/03/2018	26 Maret 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
17	Rudi Supriyadi	753/Kpts/KP.210/A2.4/04/2018	17 April 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
18	Samsudin	106/Kpts/KP.210/I.1/03/2018	26 Maret 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018
19	Nurjanah	140/Kpts/KP.210/I.1/03/2018	26 Maret 2018	Kenaikan pangkat	1 April 2018

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.165.018.142,00	10.184.082.577,00	-0,19
Belanja Lembur	399.681.000,00	239.619.000,00	66,80
Jumlah Belanja Kotor	10.564.699.142,00	10.423.701.577,00	1,35
Pengembalian Belanja Pegawai	-73,00	-10.239.072,00	-100,00
Jumlah Belanja	10.564.699.069,00	10.413.462.505,00	1,45

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp25.483.057.643,00 dan Rp34.507.469.066,00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar -26,15% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pagu anggaran dan realisasi 4 dari 6 Sub Kelompok Belanja Barang yang ada pada DIPA mengalami penurunan, hal ini sudah sesuai dengan ROK
2. Anggaran Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor mengalami 2 (dua) kali refocusing pada belanja barang (52).

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	8.634.438.500,00	6.172.531.000,00	39,88
Belanja Barang Non Operasional	5.452.063.190,00	11.934.172.170,00	-54,32
Belanja Barang Persediaan	1.578.905.000,00	854.345.000,00	84,81
Belanja Jasa	1.199.788.473,00	1.371.934.283,00	-12,55
Belanja Pemeliharaan	922.234.500,00	1.076.530.500,00	-14,33
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.732.975.539,00	13.264.588.698,00	-41,70
Jumlah Belanja Kotor	25.520.405.202,00	34.674.101.651,00	-26,40
Pengembalian Belanja Barang	-37.347.559,00	-166.632.585,00	-77,59
Jumlah Belanja	25.483.057.643,00	34.507.469.066,00	-26,15

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.571.873.400,00 dan Rp4.001.549.021,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 64,23% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pagu anggaran 3 dari 4 Sub Kelompok Belanja Modal mengalami kenaikan khusus pada belanja modal lainnya tidak ada pada tahun 2018, semua kegiatan belanja modal 53 baik pengadaan barang, konstruksi dan renovasi sudah sesuai dengan rencana.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.606.175.400,00	2.072.518.021,00	74,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.191.198.000,00	1.900.025.000,00	15,32
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	774.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	29.006.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	6.571.873.400,00	4.001.549.021,00	64,23
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	6.571.873.400,00	4.001.549.021,00	64,23

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.606.175.400,00 dan Rp2.072.518.021,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 74,00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh

No	Uraian	Total Rupiah
1	Pengadaan Laptop	63.403.000
2	Pengadaan peralatan multimedia	53.000.000
3	Pengadaan Lab ternak ruminansia	56.150.000
4	Pengadaan lab lap kampus pertanian	105.000.000
5	Pengadaan mesin babat	12.870.000
6	Pengadaan lab reproduksi ternak	171.000.000
7	Pengadaan labpasca panen peternakan	112.380.000
8	Pengadaan kendaraan roda 4 Hi ace	437.250.000
9	Pengadaan meja dan kursi Rusun	104.000.000
10	Pengadaan peralatan lab anatomi dan patologi	65.750.000
11	Pengadaan peralatan lab peternakan	376.884.600
12	Pengadaan kendaraan roda tiga	32.110.000
13	Pengadaan lab peternakan	251.256.400
14	Pengadaan lab mekanisasi pertanian	706.809.600
15	Pengadaan lab nutrisi peternakan	309.414.000
16	Pengadaan lab mekanisasi pertanian	471.206.400
17	Pengadaan lab teaching factory	56.100.000
18	Pengadaan lab teaching factory	31.900.000
19	Pengadaan lab teaching factory	28.552.000
20	Pengadaan lab teaching factory	148.200.000
21	Pengadaan neraca digital	12.939.400
	Total Belanja Barang	3.606.175.400

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.606.175.400,00	2.072.518.021,00	74,00
Jumlah Belanja Kotor	3.606.175.400,00	2.072.518.021,00	74,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.606.175.400,00	2.072.518.021,00	74,00

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.191.198.000,00 dan Rp1.900.025.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 15,32% dibandingkan TA 2017. Yang termasuk pada Sub Kelompok Belanja ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) sebesar Rp.637.600.00 beserta Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) sebesar Rp.1.553.598.000

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.191.198.000,00	1.900.025.000,00	15,32
Jumlah Belanja Kotor	2.191.198.000,00	1.900.025.000,00	15,32
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.191.198.000,00	1.900.025.000,00	15,32

B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp774.500.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2017.

No	Uraian	Total Rupiah
1	Jalan Kabupaten Lokal berupa Saluran jalan kampus	199.750.000
2	Jalan khusus lainnya berupa aspal lahan praktek	223.400.000
3	Jalan khusus lainnya berupa aspal rusun jurluhtan	221.500.000
4	Jalan khusus lainnya berupa jalan lahan sawah	129.850.000
		<u>774.500.000</u>

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	774.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	774.500.000,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	774.500.000,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp44.229.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rekening Bank	0.00	0.00
Uang Tunai	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.048.500,00 dan Rp259.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	1.048.500,00	259.000,00
Jumlah	1.048.500,00	259.000,00

No	Uraian	Nilai
1	Ordner dan Map	120.000
2	Kerta HVS	246.000
3	Kertas cover	4.000
4	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	7.000
5	Natura dan pakan lainnya	671.000
		<u>1.048.000</u>

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp387.968.335.000,00 dan Rp387.968.335.000,00.

Aset Tetap Tanah sebanyak lima bidang dengan luas total 845.174 m² senilai Rp. 387.968.335.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode dan BUP Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas	Nilai (Rp)	Lokasi	Nomor dan Tanggal Sertifikat
1	20101040011	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1956	118.095	125.496.014.000	Jl.Pancasan Muara Pasir Kuda (Muara Asri) Bogor Barat-Bogor	7873167 Hak Pakai No.7, Tanggal 28 September 1993
2	20101040012	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1950	104.898	137.737.631.000	Jl.Cibalagung Pasir Jaya (PT.Jin) Bogor Barat-Bogor	701023 Hak Pakai No.2 Tanggal 28 September 1993
3	20101040017	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1950	8.721	10.919.390.000	Jl.Cibalagung Pasir Kuda Bogor Barat – Bogor	701024 Hak Pakai No.8 Tanggal 28 September 1993
4	20101040018	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1950	62.056	71.661.649.000	Jl.Cikaret (Komp.Cikaret Hijau) Bogor Selatan – Bogor	7873168 Hak Pakai No.3 Tanggal 28 September 1993
5	20101040015	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1958	551.404	42.153.651.000	Jl.Snakma/Cisalopa Pasir Buncir,Caringin Kabupaten Bogor	6148042 Hak Pakai No.1 Tanggal 28 September 1993
Total				845.174	387.968.335.000		

Tanah Bangunan Kantor dengan kode 20101004001 NUP 7 seluas 8.721 m² dengan nilai Rp. 10.919.390.000,00 berlokasi di Jalan Cibalagung Pasir Kuda, Bogor Barat – Bogor, dikuasai oleh masyarakat dan digunakan untuk pemukiman sesuai dengan perjanjian pinjam pakai antara Kementerian Pertanian dan Kepolisian Republik Indonesia nomor 211/PL.240/J.4.5/02/2014 dan No.B/50A/II/2014 tanggal 24 Februari 2014. Terhadap aset tanah tersebut sedang dalam proses pengajuan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Pertanian kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini proses pengajuan sudah sampai di Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp30.085.356.597,00 dan Rp20.683.556.842,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	20.683.556.842,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	3.504.851.500,00
Transfer Masuk	5.934.298.205,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-37.349.950,00
Saldo per 31 Desember 2018	30.085.356.597,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-18.419.979.726,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	11.665.376.871,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi penambahan berupa :

a. Pembelian

Nilai total pembelian Rp. 3.606.175.400 yang terdiri atas intrakomtabel senilai Rp.3.504.851.500 dan ekstrakomtabel senilai Rp.101.323.900

b. Transfer masuk

Berupa pengalihan pencatatan barang milik negara dari satker Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor senilai Rp. 6.427.452.906 yang terdiri dari nilai ekstrakomtabel Rp. 481.798.734 dan nilai intrakomtabel Rp. 5.934.298.205 (BAST Transfer Keluar terlampir).

No	Uraian	Total Rupiah
1	Pengadaan Laptop	63.403.000
2	Pengadaan peralatan multimedia	53.000.000
3	Pengadaan Lab ternak ruminansia	56.150.000
4	Pengadaan lab lap kampus pertanian	105.000.000
5	Pengadaan mesin babat	12.870.000
6	Pengadaan lab reproduksi ternak	171.000.000
7	Pengadaan labpasca panen peternakan	112.380.000
8	Pengadaan kendaraan roda 4 Hi ace	437.250.000
9	Pengadaan meja dan kursi Rusun	104.000.000
10	Pengadaan peralatan lab anatomi dan patologi	65.750.000
11	Pengadaan peralatan lab peternakan	376.884.600
12	Pengadaan kendaraan roda tiga	32.110.000
13	Pengadaan lab peternakan	251.256.400
14	Pengadaan lab mekanisasi pertanian	706.809.600
15	Pengadaan lab nutrisi peternakan	309.414.000
16	Pengadaan lab mekanisasi pertanian	471.206.400
17	Pengadaan lab teaching factory	56.100.000
18	Pengadaan lab teaching factory	31.900.000
19	Pengadaan lab teaching factory	28.552.000
20	Pengadaan lab teaching factory	148.200.000
21	Pengadaan neraca digital	12.939.400
	Total Belanja Barang	3.606.175.400

2. Mutasi pengurangan berupa :

Koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp (37.349.950)

No	Uraian	Total Rupiah
1	Alat kantor	5.927.100
2	Alat rumah tangga	25.300.150
3	Alat studio	1.000.000
4	Komputer unit	1.922.700
5	Peralatan komputer	3.200.000
	Total nilai	37.349.950

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp56.990.729.818,00 dan Rp54.537.836.168,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	54.537.836.168,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	907.020.000,00
Pengembangan Melalui KDP	1.553.598.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-7.724.350,00
Saldo per 31 Desember 2018	56.990.729.818,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-7.870.389.403,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	49.120.340.415,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi penambahan, berupa :

Penyelesaian pembangunan dengan KDP

No	Uraian	Total Rupiah
1	Gedung tempat ibadah/mesjid	705.220.000
2	Rumah makan susun jurusan pertanian	<u>201.800.000</u>
		907.020.000

Untuk pembangunan mesjid dilaksanakan melalui pengadaan swakelola sehingga masih terdapat KDP pada akhir 31 Desember 2017 senilai Rp.269.420.000 dan selesai terbentuk aset per 31 Desember 2018

Pengembangan melalui KDP

No	Uraian	Total Rupiah
1	Renovasi aula gedung kantor	931.399.000
2	Renovasi rumah makan SILO	<u>622.199.000</u>
		1.553.598.000

2. Mutasi pengurangan berupa:

No	Uraian	Total Rupiah
1	Koreksi pencatatan nilai/kuantitas atas Bangunan gedung tempat kerja	7.724.350
		7.724.350

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.832.408.000,00 dan Rp5.057.908.000,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	5.057.908.000,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	351.350.000,00
Pengembangan Melalui KDP	423.150.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	5.832.408.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-2.157.882.030,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	3.674.525.970,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Mutasi penambahan, berupa :

Penyelesaian pembangunan dengan KDP

No	Uraian	Total Rupiah
1	Aspal rusun jurusan pertanian	221.500.000
2	Jalan lahan sawah	129.850.000
		351.350.000

Pengembangan melalui KDP

No	Uraian	Total Rupiah
1	Aspal lahan praktek	199.750.000
2	Saluran jalan kampus	223.400.000
		423.150.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp581.794.225,00 dan Rp581.794.225,00. Tidak mengalami perubahan nilai

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp307.820.000,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-28.668.832.009,00 dan Rp-19.435.441.694,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	30.085.356.597,00	-18.419.979.726,00	11.665.376.871,00
2.	Gedung dan Bangunan	56.990.729.818,00	-7.870.389.403,00	49.120.340.415,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.832.408.000,00	-2.157.882.030,00	3.674.525.970,00
4.	Aset Tetap Lainnya	581.794.225,00	-220.580.850,00	361.213.375,00
Akumulasi Penyusutan		93.490.288.640,00	-28.668.832.009,00	64.821.456.631,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp267.700.000,00 dan Rp30.000.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	267.700.000,00
Jumlah	267.700.000,00

C.3.2. ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp26.928.600,00 dan Rp26.928.600,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-86.641.100,00 dan Rp-49.428.600,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	267.700.000,00	-59.712.500,00	207.987.500,00
2.	Aset Lain-lain	26.928.600,00	-26.928.600,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		294.628.600,00	-86.641.100,00	207.987.500,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp58.814.600,00 dan Rp50.413.455,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Total Rupiah
1	Belanja PAM bulan Desember 2018	34.983.000
2	Belanja Listrik bulan Desember 2018	<u>23.831.600</u>
		58.814.600

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	58.814.600,00	50.413.455,00
Jumlah	58.814.600,00	50.413.455,00

C.4.2. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp77.517.917,00 dan Rp90.475.000,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNB. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Total Rupiah
1	Sewa lahan untuk BTS dengan PT Telkomsel	72.380.000
2	Sewa lahan untuk kandang ternak denga Unggul Farm	<u>5.137.917</u>
		77.517.917

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	77.517.917,00	90.475.000,00
Jumlah	77.517.917,00	90.475.000,00

C.4.3. UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp44.229.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. EKUITAS

C.5. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp452.862.495.114,00 dan Rp449.568.679.086,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp85.120.383,00 dan Rp104.900.345,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	0,00	25.100.000,00	-100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	11.429.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0,00	4.949.800,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	32.792.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	0,00	20.100.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	40.899.383,00	54.750.545,00	-25,30
Jumlah	85.120.383,00	104.900.345,00	-18,86

Pendapatan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan dikarenakan pada tahun anggaran 2018 estimasi pendapatan meningkat sedangkan sumber pendapatan dari sewa gedung berupa aula tidak dapat disewakan karena kondisi rusak dan harus renovasi.

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.564.699.069,00 dan Rp10.413.462.505,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	7.228.048.880,00	7.331.151.500,00	-1,41
Beban Pembulatan Gaji PNS	99.466,00	93.793,00	6,05
Beban Tunj. Anak PNS	145.568.879,00	139.768.576,00	4,15
Beban Tunj. Beras PNS	381.436.140,00	394.471.740,00	-3,30
Beban Tunj. Fungsional PNS	475.080.000,00	468.150.000,00	1,48
Beban Tunj. PPh PNS	37.007.400,00	33.224.456,00	11,39
Beban Tunj. Struktural PNS	109.740.000,00	117.130.000,00	-6,31
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	626.636.304,00	593.397.440,00	5,60
Beban Tunjangan Umum PNS	222.150.000,00	209.740.000,00	5,92
Beban Uang Lembur	399.681.000,00	239.619.000,00	66,80
Beban Uang Makan PNS	939.251.000,00	886.716.000,00	5,92
Jumlah	10.564.699.069,00	10.413.462.505,00	1,45

1. Semester II TA 2017 sebanyak 149 pegawai, semester II TA 2018 sebanyak 143 pegawai, hal ini mempengaruhi tunjangan yang ada.
2. Adanya 19 orang pegawai yang belum turun SK kenaikan pangkatnya , terhitung 1 april 2018

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.742.874.002,00 dan Rp1.126.615.845,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	1.672.000,00	66.490.200,00	-97,49
Beban Persediaan konsumsi	1.741.069.540,00	1.031.098.320,00	68,86
Beban persediaan lainnya	132.462,00	29.027.325,00	-99,54
Jumlah	1.742.874.002,00	1.126.615.845,00	54,70

Beban persediaan masuk dalam akun 521811

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.396.015.208,00 dan Rp19.500.135.508,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	101.323.900,00	0,00	0,00
Beban Bahan	2.146.861.600,00	3.795.138.900,00	-43,43
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.856.641.590,00	7.790.220.000,00	-63,33
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	231.405.000,00	204.735.000,00	13,03
Beban Honor Output Kegiatan	448.560.000,00	343.200.470,00	30,70
Beban Jasa Profesi	455.990.000,00	639.685.000,00	-28,72
Beban Keperluan Perkantoran	2.703.459.500,00	2.337.109.000,00	15,68
Beban Langganan Air	310.883.000,00	225.872.900,00	37,64
Beban Langganan Listrik	388.625.189,00	410.873.950,00	-5,42
Beban Langganan Telepon	28.691.429,00	36.813.288,00	-22,06
Beban Pengadaan Bahan Makanan	5.699.574.000,00	3.624.687.000,00	57,24
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	6.000.000,00	-100,00
Beban Sewa	24.000.000,00	85.800.000,00	-72,03
Jumlah	15.396.015.208,00	19.500.135.508,00	-21,05

Pada tabel diatas dari Sub Kelompok Belanja, Beban Pengadaan bahan Makanan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 57,24 %, dikarenakan jumlah mahasiswa TA 2017 sebanyak 677 orang sedangkan TA 2018 sebanyak 768 orang.

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp922.234.500,00 dan Rp1.076.530.500,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	329.325.000,00	409.499.000,00	-19,58
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	84.630.000,00	120.474.000,00	-29,75
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20.000.000,00	25.000.000,00	-20,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	16.230.000,00	18.000.000,00	-9,83
Beban Pemeliharaan Lainnya	26.500.000,00	29.995.000,00	-11,65
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	445.549.500,00	473.562.500,00	-5,92
Jumlah	922.234.500,00	1.076.530.500,00	-14,33

Pada TA 2018, STPP Bogor mengalami pemotongan anggaran/refocusing yang disisihkan dari belanja barang termasuk pada Sub Kelompok Belanja pemeliharaan

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.695.627.980,00 dan Rp13.104.426.513,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	5.227.750.779,00	9.009.470.782,00	-41,97
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.118.050.000,00	1.496.050.000,00	-25,27
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	200.792.485,00	1.406.237.800,00	-85,72
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.149.034.716,00	1.192.667.931,00	-3,66
Jumlah	7.695.627.980,00	13.104.426.513,00	-41,27

Pada TA 2018, STPP Bogor mengalami pemotongan anggaran/refocusing yang disisihkan dari belanja barang termasuk pada Sub Kelompok Belanja Perjalanan dinas

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp9.282.393.483,00 dan Rp5.527.514.115,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	37.212.500,00	7.500.000,00	396,17
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	62.174.506,00	62.174.508,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.706.175.002,00	2.695.515.016,00	74,59
Beban Penyusutan Irigasi	201.055.491,00	216.294.760,00	-7,05
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.179.852.731,00	544.677.286,00	116,62
Beban Penyusutan Jaringan	10.732.226,00	10.732.226,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.085.191.027,00	1.990.620.319,00	54,99
Jumlah	9.282.393.483,00	5.527.514.115,00	67,93

D.8. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-270.325,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	-270.325,00	-100,00
Jumlah	0,00	-270.325,00	-100,00

TA 2018 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk laporan Keuangan 2017 sudah dibayarkan pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2018. (Surat Tanda Lunas terlampir)

D.9. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-38.400.000,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-8.804.635,00	-4.302.500,00	104,64
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0,00	44.972.731,00	-100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	11.377.750,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	37.349.950,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	173.563.137,00	276.596.345,00	-37,25

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2018

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	43.305.862,00	8.281.100,00	422,95
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	31.966.910,00	-100,00
Jumlah	218.392.064,00	357.514.586,00	-38,91

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp449.568.679.086,00 dan Rp214.956.984.059,00.

E.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-45.300.331.795,00 dan Rp-50.285.999.730,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.790.668,00 dan Rp236.286.986.819,00.

E.4.1. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4.2. KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.790.668,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.148.763,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.641.905,00
Gedung dan Bangunan	-7.724.350,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	37.349.950,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	7.724.350,00
Pengembalian Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	37.349.950,00
Pengembalian Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	7.724.350,00
Peralatan dan Mesin	-37.349.950,00
Jumlah	11.790.668,00

E.4.3. PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.4. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp236.286.986.819,00.

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp48.582.357.155,00 dan Rp48.610.707.938,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	42.619.630.112,00
Diterima dari Entitas Lain	-209.271.162,00
Transfer Masuk	6.171.998.205,00
Jumlah	48.582.357.155,00

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-209.271.162,00 sedangkan DKEL sebesar Rp42.619.630.112,00.

E.5.2. TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.171.998.205,00 yang terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.171.998.205,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2018.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin		5.934.298.205,00
2.	Software		237.700.000,00
Jumlah			6.171.998.205,00

E.6. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp452.862.495.114,00 dan Rp449.568.679.086,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Revisi Ke	Tanggal Revisi	Jumlah Total DIPA
1	29 Januari 2018	42.700.825.000
2	20 Pebruari 2018	42.700.825.000
3	28 Maret 2018	44.368.325.000
4	27 April 2018	44.368.325.000
5	25 Juni 2018	43.142.982.000
6	13 Juli 2018	43.142.982.000
7	08 Oktober 2018	43.142.982.000
8	02 Nopember 2018	43.434.047.000
9	28 Nopember 2018	43.434.047.000

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Tahun Anggaran 2018 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor mengalami pemotongan anggaran / refocusing.
2. Tahun Anggaran 2018 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor melaksanakan kegiatan pendampingan dengan beberapa Universitas di Jawa Barat, Unila, Unsri